



Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik di Kabupaten Poso

I Ketut Yakobus¹, Muhamad Yahya², Andi Dodi May Putra Agustang³

¹Sosiologi, Universitas Kristen Tentena, Email: ketut.yakobus@gmail.com

²Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Email: yahyaunsa@gmail.com

³Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, Email: andidodi044@gmail.com

Artikel Info

Article History:

Received : 18-04-2019

Revised : 25-04-2019

Accepted : 30-04-2019

Keywords:

Revitalization; Sintuwu Maroso; Resolution

Kata Kunci:

Revitalisasi; Sintuwu Maroso; Resolusi

Abstract: *This study aims to identify the values contained in the culture Sintuwu Maroso and to discover the role of cultural values Sintuwu Maroso's in Poso conflict resolution. The research method used in this study is a qualitative method using the Lewis Cosser theory. The results showed that the culture Sintuwu Maroso was the local wisdom of the Pamona Poso community which contained very noble values, namely: the value of togetherness, courtesy, brotherhood, tolerance, solidarity and the value of unity. The culture of Sintuwu maroso has a very important role in efforts to build peace in Poso, among others: as an adhesive element (cohesive aspect) across citizens, across religions and beliefs, as a social safety valve for the Poso community in reducing conflict and as a driver of togetherness. The values contained in it can be used as social capital in building peace so that can be created social order in society.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Sintuwu Maroso dan untuk menemukan peranan nilai-nilai Budaya Sintuwu Maroso dalam resolusi konflik Poso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan teori Lewis Cosser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sintuwu Maroso merupakan kearifan lokal masyarakat Pamona Poso yang mengandung nilai-nilai yang sangat luhur yaitu: nilai kebersamaan, sopan santun, persaudaraan, toleransi, solidaritas dan nilai persatuan. Budaya sintuwu maroso mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya membangun perdamaian di Poso, antara lain: sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan, sebagai katup pengaman sosial bagi masyarakat Poso dalam meredam terjadinya konflik dan sebagai pendorong terbangunnya kebersamaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam membangun perdamaian sehingga tercipta social order dalam masyarakat*

Corresponden author:

Email: ketut.yakobus@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Konflik antar komunitas dalam masyarakat dapat kerap dilihat sebagai kondisi yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar mana kala sudah melibatkan tindak kekerasan. Konflik berwajah agama, berlatar belakang etnik, suku, ras, dan golongan, serta yang bernuansa politis muncul silih berganti di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso sejak tahun 1998. Sebelum terjadi konflik, masyarakat Poso yang berbeda etnis dan agama hidup dalam keharmonisan, diikat oleh budaya *Sintuwu Maroso* yang sangat kuat. Budaya *Sintuwu Maroso* adalah budaya masyarakat asli Poso, dalam hal ini suku Pamona yang hidup, bertumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Selama ini budaya *Sintuwu Maroso* menjadi salah satu perekat yang sangat efektif untuk menyatukan masyarakat local dan pendatang dalam suatu komunitas masyarakat Poso yang damai. Akan tetapi hubungan itu menjadi renggang ketika pecah konflik social pada Desember 1998, yang kemudian konflik ini meluas dan bertambah hebat ketika simbol-simbol agama dipaksakan untuk melegitimasi konflik tersebut.

Konflik Poso menurut sebagian besar pengamat merupakan konflik horizontal antar agama, meskipun sebenarnya konflik tersebut tidaklah sesederhana itu, karena melibatkan juga persilangan antar etnik, baik local maupun pendatang dan kepentingan politik sipil maupun militer serta masuknya kekuatan luar, baik seperti lascar jihad maupun militer seperti satuan-satuan TNI dan POLRI yang di BKO-kan. (Anonim, 2005), (Jusri, 2015:76).

Sementara menurut Gerry van Kliken (2003), mengatakan bahwa konflik Poso yang terjadi tahun 1998, lebih didorong oleh eskalasi isu, baik melalui penyebaran informasi lewat jalur yang sudah terbentuk (*difusi*) maupun penyebaran antar komunitas yang sebelumnya tidak memiliki ikatan social. Ikatan yang kemudian muncul antar komunitas itu membuat konflik Poso yang bermula dari pertengkaran dua pemuda mabuk menjadi konflik antar agama yang mendapat perhatian internasional (Anonim, 2005).

Terlepas dari anatomi dan pendefinisian apakah konflik yang terjadi di Poso pada tahun 1998-2007 merupakan konflik elit atau karena benturan etnik dan agama, defakto konflik tersebut telah banyak menimbulkan korban jiwa dan materi serta teror psikologis yang luar biasa terhadap warga, juga sekaligus memperburuk segregasi social yang telah ada sebelumnya.

Tercabik-cabiknya masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh konflik bernuansa suku, agama, dan ras (SARA), mendorong banyak tokoh agama maupun pemerintah untuk ikut memikirkan usaha-usaha sebagai upaya untuk meredakan dan mengurangi konflik berdarah yang menimpa umat beragama. Beragam strategi resolusi konflik pun bermunculan. Baik yang didesaian oleh institusi-institusi Negara, maupun dibangun dari basis kesadaran dikalangan masyarakat bawah, terutama dari mereka yang berkonflik.

Salah satu resolusi konflik yang disponsori dan difasilitasi oleh pemerintah ialah dengan dilaksanakannya deklarasi Malino I, pada 20 Desember 2001. Setelah deklarasi Malino untuk Poso diberlakukan, konflik terbuka antar kelompok di Poso berhasil dihentikan sementara. Namun dalam perjalanannya, kekerasan di Poso masih kerap terjadi. Berbagai kasus bermunculan seperti teror, upaya mengadu domba yang dapat dilihat melalui penembakan-penembakan misterius, pembunuhan, peledakan

bom. Berdasarkan data sementara yang peneliti dapat kumpulkan, bahwa sejak deklarasi malino 2001 sampai sekarang ini telah terjadi 173 kali insiden pelanggaran terhadap kesepakatan deklarasi Malino. Insiden yang paling terbaru adalah tanggal 31 Desember 2018 terjadi pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil bernama Ronal Batau alias Anang umur 36 tahun di desa Salubanga dusun Manggalapi, kecamatan Sausu, serta terjadinya kontak senjata antara kelompok jaringan (MIT) pimpinan Ali Kalora dengan pasukan operasi Tinombala yang melukai dua anggota Brimop, yakni Bripka Andrew Maha Putra dan Bripda Baso. Peristiwa-peristiwa tersebut kembali menimbulkan rasa trauma, saling curiga dan meningkatkan sensitivitas ditingkat masyarakat (Ahmad, 2009:174)

Hingga saat ini, konflik Poso disatu pihak dapat dikatakan berhenti, dalam arti tidak ada lagi pertikaian terbuka antara kelompok, tetapi dilain pihak potensi terjadinya konflik masih ada. Indikasi itu dapat dilihat, antara lain masih terjadi terror dan belum berhasil dilakukannya pemulangan pengungsi ketempat asalnya, serta terjadinya sabotase pemilikan tanah yang ditinggalkan oleh warga yang mengungsi. Masyarakat takut kembali karena trauma masa lalu dan kuatir akan terjadi kembali konflik yang sama. Sampai saat ini masih banyak para pengungsi belum kembali ketempat asal mereka terutama warga Kristiani yang sebelumnya berdomisili di kota Poso, seperti kelurahan Lombugia, kelurahan Kasintuwu, kelurahan Kayamanya, kelurahan Sayo, kelurahan Moengko, kelurahan Bonesompe, kelurahan Gebang Rejo, desa bukit Bambu. Demikian pula sebaliknya dengan masyarakat Muslim yang berdomisili diwilayah-wilayah Kristen, seperti desa Sintuwu Lemba dan di Kecamatan Pamona Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi Poso belum kondusif sepenuhnya.

Disamping itu pula, penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih kepada pendekatan keamanan. Sedangkan pendekatan budaya kerap kali terpinggirkan, pada hal masyarakat poso memiliki budaya *sintuwu Maroso* yang bermakna luhur untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian masyarakat (Jati, 2013:395).

Akhir-akhir ini pendekatan Budaya sering dirujuk oleh pemerhati konflik sebagai alternatif untuk mengatasi konflik. Menurut Haba (2006), kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuh kembang dalam sebuah masyarakat, dikenal, dipercayai dan dialami sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat.

Berangkat dari kenyataan inilah maka Peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji kekayaan nilai-nilai budaya *Sintuwu Maroso* dalam rangka membangun rekonsiliasi di Poso dari sudut pendekatan Budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Budaya Sintuwu Maroso

Kruyt (1977:19) dalam tulisannya tentang Kabar Keselamatan di Poso menyatakan bahwa masyarakat Poso hidup dalam budaya "Mosintuwu". Mosintuwu berasal dari kata "Sintuwu" yang berarti bercampur-gaul dengan baik. Dalam kata "Sintuwu" ini terdapat paham "hidup bersama" atas dasar "kesamaan kehidupan". Hal ini didasari oleh suatu pola kehidupan bersama yang menyebabkan, bahwa orang berjalan bersama-sama, mengambil jalan yang sama, memperlihatkan diri dengan seperasaan.

Hasan, dkk (2004:22) dalam tulisannya tentang sejarah Poso, menyatakan bahwa *Sintuwu Maroso* ialah sistem kemasyarakatan masyarakat Poso yang terwujud dalam bentuk gotong royong, yakni suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik guna mewujudkan keteraturan hubungan social dalam masyarakat Poso. Secara umum, wujud pelaksanaan gotong royong memiliki tiga asas pokok, yaitu asas berlandaskan spontanitas, asas berlandaskan pamrih, asas untuk memenuhi kewajiban sosial.

Kata *sintuwu maroso* berpedoman dari dua kata, yaitu *sintuwu* dan *maroso*, berasal dari bahasa pamaona, suku terbesar yang mendiami wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Poso. *Sintuwu* berarti bersatu, seia sekata, sepakat, setuju. *Maroso* berarti kuat, kokoh, teguh. Dengan demikian *sintuwu maroso* berarti bersatu teguh. Apabila seia sekata berarti ada kesepakatan dan kesepakatan berarti didalamnya ada persetujuan bersama.

Budaya *sintuwu maroso* merupakan budaya local masyarakat tanah Poso yang mengandung nilai-nilai yang diyakini sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu system nilai budaya, *sintuwu maroso* berfungsi sebagai pedoman atau pandangan hidup (falsafah hidup) baik dalam membentuk sikap mental maupun dalam cara berpikir dan bertingkah laku, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, juga termasuk bagi para pemimpin atau tokoh-tokoh dalam masyarakat. Anonim (2010).

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang hendak dikonsepsikan berkaitan dengan judul penelitian ini ialah teori konflik fungsional yang dirumuskan oleh seorang sosiolog Amerika non Marxian berkebangsaan Jerman, yaitu Lewis Coser (1913). Lewis Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir, dilangsungkan, atau dieliminir saingannya. Meskipun definisinya memfokuskan pada adanya pertentangan, perjuangan memperoleh sesuatu yang langka, yakni dimana setiap orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain. Menurut Coser tidak semua konflik berakibat pada pertentangan atau disfungsi (tidak baik), tetapi menurutnya ada juga konflik yang bersifat fungsional (baik). Coser memulai pendekatannya dengan suatu kecaman terhadap tekanan pada nilai atau konsensus normatif, keteraturan, dan keselarasan. Dia mengemukakan bahwa proses konflik dipandang dan diperlukan sebagai sesuatu yang mengacaukan atau disfungsi terhadap keseimbangan sistem keseluruhan (Johnson; 1990)

Coser menekankan fungsi konflik dalam rangka mempertahankan keutuhan masyarakat, dalam arti tertentu konflik dengan kelompok lain bisa memperkuat solidaritas di dalam kelompok yang agak longgar. Coser mengemukakan bahwa kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Jadi adanya konflik eksternal akan lebih memperkuat solidaritas dan interaksi kelompok (Johnson ; 1990).

Menurut Coser, konflik social yang terjadi dalam masyarakat mempunyai fungsi antara lain:

- a. Konflik membantu membersihkan suasana yang sedang kacau. Sehingga katup pengaman (*safety valve*) berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan.
- b. Energi-energi agresif dalam konflik realistis (berasal dari kekecewaan) dan konflik tidak realistis (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan) mungkin terakumulasi dalam proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan.
- c. Konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan.
- d. Konflik dapat dipakai sebagai indikator dari kekuatan dan stabilitas suatu hubungan
- e. Konflik dengan berbagai out group dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok.

Berdasarkan pada teori konflik fungsional Lewis Coser di atas, maka peristiwa konflik sosial yang terjadi di Poso secara internal memberikan sumbangsih positif terhadap masyarakat di Kabupaten Poso untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tingkat kohesi sosialnya melalui budaya *Sintuwu Maroso*. Dalam perspektif sosiologis, budaya *Sintuwu Maroso* tersebut bekerja dalam nalar yang dalam istilah Coser disebut sebagai katup pengaman sosial (*safety valve*). yang berfungsi meredakan konflik sosial. Artinya apabila katup-katup sosial-budaya tersebut mengalami kemacetan fungsi atau disfungsi maka sistem dan tata hubungan sosial masyarakat akan terjadi disorganisasi. Sebuah situasi dimana antar sesama warga menihilkan kesopanan, penghargaan dan menafikan penerimaan koeksistensi dalam ruang kesadaran berkemajemukan.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan jumlah informan 20 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang mengetahui tentang konflik di Poso dan yang memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya *sintuwu maroso*. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, *display data*, dan *verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso tidak terlepas dari konspirasi elit-elit politik local dalam memperebutkan posisi jabatan Bupati dengan menggunakan sentiment agama untuk memecah belah masyarakat Poso yang hidup rukun dan damai. Taktik ini berhasil memprovokasi dan menghancurkan masyarakat Poso. Selain faktor politik ada juga faktor-faktor lain yang turut memicu terjadinya konflik di Poso, antara lain: faktor sosial ekonomi, Faktor pendidikan, yakni rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Poso. Hal ini turut mempengaruhi terjadinya konflik, karena masyarakat mudah diprovokasi dan diadu domba.

Keseriusan pemerintah untuk mengatasi konflik dan kekerasan di Poso, dengan mengedepankan pendekatan keamanan ternyata tidak terlalu efektif untuk dapat menghentikan konflik dan kekerasan di Poso. Fakta dilapangan membuktikan bahwa

konflik dan kekerasan terus terjadi, korban dikedua belah pihak terus berjatuhan. Peneliti melihat hal ini terjadi karena resolusi konflik yang dibangun oleh pemerintah tidak diikuti dengan penegakan supremasi hukum yang serius dengan menindak berbagai pelaku teror dan pelaku kekerasan.

Adanya konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Poso telah menumbuhkan kesadaran baru, yakni perasaan serumpun antar penduduk asli, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pendekatan yang dilakukan dalam membangun rekonsiliasi di Poso ialah melalui pendekatan budaya. Ada dua model pendekatan budaya yang dilakukan, yakni:

Pertama, pada tanggal 22 Agustus 2000, dilaksanakan kesepakatan damai dalam ritual adat Pamona yang disebut *rujuk sintuwu maroso* dengan melaksanakan adat *motambu tana*, yang ditandai dengan pemotongan seekor kerbau tambun dan kepalanya dikubur dengan symbol bahwa permusuhan telah dikuburkan bahkan dilupakan. Daging kerbau dimakan secara bersama dalam kebersamaan. Siapa yang melanggar akan dihukum secara adat dengan jalan *mosampu tana*, artinya terusir dari tanah Poso.

Kedua, terbentuknya forum siwagi lemba pada bulan Mei 2004, yang menarik dari pertemuan itu ialah nuansa adat/budaya yang mengikat kedua komunitas itu. Dibandingkan dengan perhelatan rekonsiliasi yang lainnya, pertemuan yang melibatkan ribuan orang ini, boleh dikata memiliki budaya yang lebih kental. Pendekatan budaya ini telah membawa dampak positif bagi upaya mewujudkan perdamaian di Poso, walaupun pada saat itu kekerasan terus berlanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan Poso damai. Seperti peristiwa bom Tentena, 28 Mei 2005 yang telah menelan banyak korban, penembakan warga di desa Sepe dan Masani, serta penembakan aparat keamanan (Polisi) (Djanggih & Ahmad, 2017) sepanjang tahun 2012, tetapi masyarakat sudah cukup menyadari bahwa konflik tersebut terjadi bukan karena perang agama melainkan konflik yang sarat dengan kepentingan, sehingga masyarakat dapat menahan diri untuk tidak mudah terprovokasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu.

Pendekatan budaya lebih menyentuh dan dapat diterima, karena dapat menembus benteng perbedaan dan melampaui sekat-sekat primordialisme komunal yang selama ini menghambat proses rekonsiliasi. Budaya *Sintuwu Maroso* tersebut mendatangkan atmosfer sosial yang positif dalam diri warga masyarakat Poso dan membawanya untuk mengungkapkan nilai-nilai yang diikat dan dihayati dalam bentuk-bentuk yang khas, seperti dalam tata sosial, tata politik, adat istiadat dan tata krama. Dalam perspektif sosiologis, budaya *sintuwu Maroso* tersebut bekerja dalam nalar yang dalam istilah Coser disebut sebagai katup pengaman sosial (*safety valve*) yang berfungsi meredam konflik sosial.

SIMPULAN

1. Budaya *sintuwu Maroso* merupakan budaya local atau kearifan Lokal masyarakat tanah Poso yang mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *sintuwu maroso* itu ialah:

- a. Nilai kebersamaan/gotong royong. Nilai ini terimplementasi dalam prinsip hidup saling menopang (tuwu siwagi).

- b. Nilai sopan santun. Nilai ini terimplementasi dalam prinsip hidup saling menghormati dan menghargai (*tuwu mombetubunaka*).
 - c. Nilai persaudaraan/kerukunan. Nilai ini terimplementasi dalam prinsip hidup saling mengasihi baik dalam ruang lingkup kenalan, handai tolan (*tuwu mombepomawo*).
 - d. Nilai toleransi. Nilai ini terimplementasi dalam prinsip hidup saling menerima dan saling mengakui perbedaan dalam keanekaragaman etnis, budaya dan keyakinan sebagai komunitas masyarakat kabupaten Poso (*tuwu simpande raya*).
 - e. Nilai solidaritas. Nilai ini terimplementasi dalam sikap hidup saling menghidupi satu dengan yang lainnya demi kelangsungan hidup bersama secara utuh (*tuwu malinuwu*), dan juga terimplementasi dalam prinsip hidup saling kepedulian terutama didalam menciptakan kesempatan untuk hidup (*tuwu mombepatuwu*).
 - f. Nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini terimplementasi dalam prinsip hidup menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan baik secara intern maupun antar komunitas yang hidup di Tanah Poso (*tuwu sintuwu raya*).
2. Sebagai kearifan local budaya sintuwu maroso mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya membangun perdamaian di Poso, antara lain:
- a. Sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.
 - b. Sebagai katup pengaman social (safety valve) bagi masyarakat Poso dalam meredam terjadinya konflik.
 - c. Sebagai pendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebuah mekanisme bersama, untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir dan bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan bertumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintergrasi
 - d. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan sebagai modal social seperti gotong royong/kebersamaan, persatuan, solidaritas social, sopan santun, persaudaraan, toleransi, etika, kepatuhan dan pola anutan dalam masyarakat sehingga tercipta *social order* dalam masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Poso telah menumbuhkan kesadaran baru, yakni perasaan serumpun antar penduduk asli, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Disarankan agar dilakukan pendekatan budaya untuk mempersatukan kembali masyarakat Poso yang sudah terpecah-pecah akibat konflik melalui budaya *sintuwu maroso* yang selama ini terbilang sangat efektif sebelumnya.
2. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *sintuwu maroso*, maka perlu ada program Pemerintah untuk memberdayakan Majelis adat yang ada di Kabupaten Poso dan menjadikan nilai-nilai budaya *sintuwu maroso* itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan khususnya muatan lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada: Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Kristem Tentena, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Negeri Makassar Makassar, atas motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, H. A. (2016). Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 162-180.
- Anonim, 2005. Edi MT. Sianturi, *Konflik Poso dan Resolusinya*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=7>
- Anonim, 2008. Ermenjildo da Costa, *Rekonsiliasi Ajang Konflik Kemanusiaan*, <http://www.hamline.edr:/apakhabar/basisdatall/999I03/29I00I4.htm>.
- Anonim, 2010. *Laporan Hasil Semi Loka Budaya Sintuwu Maroso*. Majelis Adat Pamona Kabupaten Poso.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Haba. J, 2006. *Analisis SWOT : Kearifan Local Dalam Resolusi Konflik*, paper, tidak dipublikasikan.
- Hasan, Waru D, Mahid, 2006. *Sejarah Poso*. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Jati, W. R. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393-416.
- Johnson, Doyle Paul, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jusri (2015). Peranan Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Bau-Bau, *Jurnal Sosio Sains*, 4(1), 72-79.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.